

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BUMDES (STUDI PADA DESA TORONGREJO KOTA BATU)

MN Romi Amin Setiawan^{1*}, Dewa Ayu Putu Shandra Dewi²,
Emei Dwinanarhati Setiamandani³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email korespondensi: romijasujan@gmail.com

***Abstract:** Government Regulation Number 11 of 2021 is a reinforcement of BUMDes institutions. BUMDes Torongrejo was chosen as one of the established village samples so that it can be analyzed from a management perspective. To measure the implementation of this policy, the Edward III model is used as a basis for analysis. This research uses a qualitative type in the form of descriptive. The results obtained from this research show that in an implementation manner, it must be strengthened on the management side. The participation of the village and community partners is the key to the sustainability of BUMDES.*

***Keywords:** Policy, BUMDes, Management*

Abstrak : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merupakan penguat terhadap kelembagaan BUMDes. BUMDes Torongrejo dipilih sebagai salah satu sampling Desa yang mapan sehingga dapat di analisa dari sisi pengelolaan. Untuk mengukur penerapan kebijakan ini maka digunakanlah model Edward III sebagai dasar menganalisa. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang berbentuk deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh bahwa secara implementatif harus dikuatkan pada sisi pengelolaan. Peran serta pihak desa dan masyarakat yang menjadi mitra menjadi kunci keberlangsungan dari BUMDES.

Kata Kunci: Kebijakan, BUMDes, Manajemen

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal istilah BUMDes saat ini sudah menjadi tren baru dalam dunia pemerintahan lokal. Sejak di terapkannya otonomi dan berkembang melalui Undang-Undang Desa, maka banyak bermunculan lembaga ini. Peraturan Pemertintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes mempertegas keberadaan lembaga ini untuk harus ada untuk mewujudkan kemandirian desa dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pada Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang ada. Di Jawa Timur sendiri sudah mencapai 7.724 Desa , namun masih 5.432 Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa.

Selain itu pada Jawa Timur sendiri jumlah Badan Usaha Milik Desa yang telah terbentuk sebanyak 5.432 Badan Usaha Milik Desa di 29 kabupaten dan kota batu, dengan klasifikasi antara lain : 47,66 persen atau 2.589, desa tingkat dasar; 44,73 persen atau 2.430, desa tingkat tumbuh; 7,61 persen atau 413 desa, tingkat berkembang dan maju. Dalam rangka mengembangkan BUMDes, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah memprioritaskan pengembangan BUMDes melalui pemberdayaan BUMDes serta kemitraan BUMDes dalam bentuk pengalokasian dana bantuan keuangan sebagai tambahan modal bagi BUMDes di berbagai desa untuk mengembangkan kegiatannya Lembaga BUMDes yang dirasa membutuhkan dan dapat berkembang optimal

Pada penelitian ini diambil sampling salah satu BUMDes di Desa yang terletak di Kota Batu. Kota Batu merupakan kota yang cukup mapan secara finansial, baik finansial yang ada pada pemerintah daerah maupun di tingkat desa. Rata-rata desa di Kota Batu sudah banyak yang berstatus Desa Mandiri, dimana desa ini secara pengelolaan sangat baik. Badan Usaha Milik Desa Berkah Torongrejo Atau Disingkat BUMDes Bejo adalah badan usaha yang didirikan pemerintah desa Torongrejo kota Batu

Jawa Timur. Awalnya didirikan pada tahun 2016, tetapi adanya sedikit kendala sehingga diresmikan pada tahun 2018. Nama BUMDes adalah Berkah Torongrejo atau disingkat Bejo (Bejo dalam Bahasa Indonesia beruntung), karena berharap kegiatan yang dilakukan menjadi berkah dan keberuntungan khususnya bagi seluruh masyarakat Desa Torongrejo.

Unit usaha yang ada seluruh manajemennya dikendalikan oleh BUMDes Bejo dan mitranya pihak luar yang berkaitan dengan jenis usaha. Mitra Bejo bisa berupa perorangan, kelompok, lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lain sebagainya. Untuk bisa memahami Implementasi kebijakan pemerintah tahun 2021 tentang BUMDES, maka peneliti mengambil teori implementasi kebijakan dengan Teori (model) Edward III. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pelaku kebijakan kepada komunikan”. Informasi tentang produk dengan sifat kebijakan publik harus disampaikan kepada komunikator (pelaku kebijakan) agar dapat mengetahui hal-hal yang wajib disiapkan untuk melaksanakan kebijakan . Hal itu dilakukan agar produk kebijakan dapat menyelesaikan masalah.

b. Sumberdaya.

Faktor sumberdaya memiliki peranan penting. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

c. Disposisi.

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) adalah “faktor maksud dari pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara nyata untuk mencapai tujuan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan dikategorikan efektif dan efisien, implementor tidak cukup mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus memiliki kesungguhan untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi ini menurut Edward III memiliki aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.SOP dalam perspektif ini merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan ketepatan waktu, pemnuhan sumber daya serta kebutuhan penyediaan dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan kualitatif. Sugiyono (2021:7) menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata – kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dari responden. Metode ini menggunakan teknik dasar dari triangulasi Teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan informan menggunakan snowball sampling dengan key informan yaitu Kepala BUMDes.

PEMBAHASAN

Peraturan Desa Torongrejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berkah Torongrejo. Selanjutnya Peraturan Desa Torongrejo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Desa Torongrejo pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Torongrejo. Pengelolaan BUMDes yang sudah dijalankan yang sesuai juga dengan penelitian terdahulu oleh Kateria Fitriska (2017) bahwa pengembangan BUMDes juga masih belum berjalan maksimal karena masih kurang pemahaman masyarakat terkait manfaat BUMDes dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, bisa berjalannya strategi pengelolaan BUMDes yang dimulai dari adanya sosialisasi yang dijalankan oleh Pihak BUMDes tetapi hasil yang didapat masih sangat minim dan belum maksimal dalam sosialisasi kepada masyarakat di Desa Torongrejo, tetapi seharusnya sosialisasi bukan hanya dari pihak BUMDes saja harus juga adanya dari pemerintah desa yang ikut serta membantu dalam mensosialisasikan BUMDes kepada Masyarakat Torongrejo.

Penelitian Muhammad Fajar Nandra Cahya dan Ety Rahayu (2019) bahwa unit Desa terus mengalami peningkatan dan juga dengan adanya bantuan BUMDes bisa menambah pendapatan desa dan perekonomian masyarakat Desa, ini menandakan bahwa BUMDes yang ada di Desa Torongrejo juga sudah mengalami peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi mitranya BUMDes, karena mitra Bumdes juga bersama-sama membantu BUMDes meningkatkan pendapatan asli Desa Torongrejo. Perencanaan pembanguan yang lebih kepada pengarah sumber daya manusianya yaitu dengan mengembangkan produk-produk masyarakat yang awalnya BUMDes memberikan pelatihan dalam pengolahan bahan- bahan pertanian sayur atau bawang untuk dapat dijadikan produk yang memiliki nilai jual lebih ketimbang hanya dijual dengan tidak nilai jual yang tinggi. Hasil yang didapat dari peneliti ada juga inovasi yang sudah di BUMDes Torongrejo yaitu adanya pertanian organik melewati Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) .

Badan Usaha Milik Desa Berkah Torongrejo atau disingkat BUMDes Bejo merupakan Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur Pada Tahun 2018. Dari pendirian BUMDes tidak terlepas dari dukungan Pemerintaahn Desa Torongrejo (Pemerintah Desa, BPD, LPMD), Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pemerintah Kota Batu, Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Serta Dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi yang hal ini memalui pendamping Desa. Tujuan dari adanya BUMDes di Desa Torongrejo sebagai salah satu organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting dalam rangka menguatkan ekonomi perdesaan, maka adanya upaya mendorong organisasi ini untuk mampu mengelola aset ekonomi strategis di Desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi untuk jadi daya saing ekonomi perdesaan, maka BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Desa.

Pengelolaan BUMDes tidak akan terlepas dari semua pihak yang membantu mensosialisasikan kepada semua masyarakat, tetapi juga semuanya harus bisa bekerjasama untuk mengembangkan BUMDes Berkah Torongrejo demi kesejahteraan mayarakat semua yang ada di Desa Torongrejo.

Komunikasi

Aspek komunikasi pada implementasi ini adalah sosialisasi dari pihak BUMDes pada mitra. Bentuk sosialisasi yang dilakukan pada Desa Torongrejo dilakukan secara internal yang mencakup antar pemangku kepentingan saja. Hal ini disebabkan kebijakan yang di sasar dalam hal ini adalah “pengelolaan”, bukan “pembentukan”. Jika pembentukan sudah di rapatkan dalam musyawarah desa yang menjadi syarat dalam pembentukan BUMDes.



Gambar 1. Bentuk Komunikasi BUMDes Torongrejo
Sumber : Data Sekunder, 2021

Komunikasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan dengan dengan komunikan. Komunikan dilakukan pimpinan BUMDes. Berdasarkan komunikasi ini maka terbentuknya koordinasi yang mudah antar pemangku kepentingan dan penyamaan persepsi terhadap kebijakan yang dimaksud. Penelitian sebelumnya yaitu Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (2016), dalam pembahasan yang dinyatakan bahwa komunikasi dan sosialisasi menjadi hal yang perlu ditingkatkan, karena sebagian masyarakat masih belum mengetahui sosialisai oleh pihak BUMDes kemasyarakat terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dan juga pelaporan kinerja yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes, sehingga bisa menjadi tuntutan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dari Pengelola BUMDes.

Sama halnya dengan BUMDes yang ada di Desa Torongrejo, Sosialisasi yang berjalan dalam lingkup BUMDes di Desa Torongrejo sudah bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat, meski belum sepenuhnya dapat menjangkau semua masyarakat untuk bisa ikut aktif terlibat dalam pengembangan BUMDes untuk memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat dan peluang kerja kepada masyarakat di Desa Torongrejo, tetapi sampai sekarang yang lebih berperan aktif dalam pemberian sosialisasi yaitu dari Pihak BUMDes dan dari pihak Pemerintah Desa masih belum.

Pihak BUMDes yang berusaha mengajak mitra dan masyarakat untuk bisa mengembangkan produk atau usaha dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar untuk bersama-sama memajukan produk dari masyarakat karena selain perekonomian membaik, tingkat pengangguran bisa berkurang apalagi dikalangan anak muda yang ada disekitaran Desa Torongrejo. Adanya pemberian pemahaman oleh pihak BUMDes kepada masyarakat tentang manfaat BUMDes menjadikan masyarakat akan memahami manfaat BUMDes yang juga bermanfaat kepada masyarakat. Tetapi juga pihak BUMDes belum bisa mengajak masyarakat terutama dibidang pertanian agar bisa bekerjasama dengan BUMDes dapat membantu menyediakan bibit atau menyediakan pupuk yang bisa membantu para petani mendapatkan hasil pertanian yang baik dan berkualitas.

Sehingga memang masyarakat juga dapat merasakan adanya manfaat dengan berdirinya BUMDes. Selain itu juga belum merasakana dampak ke arah kesejahteraan masyarakat dengan adanya BUMDes di Desa Torongrejo, sehingga dapat menjadi sebuah pertimbangan BUMdes Torongrejo kedepannya.



Gambar 2. Bentuk Komunikasi BUMDes Torongrejo kepada pemilik toko dan usaha lainnya sebagai *stakeholder*

Sumber : Data Sekunder, 2021

Pada gambar 2 dalam rapat pertemuan, pihak BUMDes menyanggupi datang langsung ke setiap toko yang ada di Desa Torongrejo dan menyampaikan bahwa bisa membantu pemilik toko jika ingin membeli keperluan toko tanpa harus pergi jauh ke pasar lagi dengan tambahan biaya lagi oleh pemilik toko. Pihak BUMDes juga bersedia mengantarkan kebutuhan yang diperlukan toko tersebut langsung ke toko, tidak harus pemilik toko yang datang ke pihak BUMDes.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Tentang Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa bisanya tercapainya juga kesejahteraan karena adanya kebutuhan yang terpenuhi yaitu kebutuhan material yang bisa didapat dengan masyarakat bisa menambah pendapatan mereka dan juga bisa mengembangkan potensi dari sumber daya manusia yang ada sehingga bisa membuka lapangan kerja yang ada di Desa Torongrejo sehingga bisa menjadikan masyarakatnya bisa meningkatkan potensi dan kemampuan diri mereka dan bisa membuka peluang besar bagi para masyarakat yang ada.

Bertani masyarakat yang dulu masih dengan model yang lama sekarang sudah rencana perbaharuan yaitu hidroponik atau tanaman organik, karena dengan adanya inovasi untuk bidang pertanian yang hidroponik bisa juga menambah pengetahuan dan bisa mendapatkan hasil yang baik dibidang pertanian tetapi bukan hanya para petani saja melainkan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Desa Torongrejo. Kemudian tanaman hidroponik ini masih dalam tahap perencanaan oleh pihak BUMDes.

Sumber Daya

Sumber daya berdasarkan teori Edward III salah satu yang sudah siap adalah sarana dan prasarana. Selain daripada bermitra dengan unit sudah di lura BUMDes, pada BUMDes Torongrejo sudah mempersiapkan sarana berupa unit usaha.



Gambar 3. Sumber Daya Sarana BUMDes Torongrejo.

Sumber: Data Sekunder, 2021

BUMDes Berkah Torongrejo ada beberapa jenis usaha yang dikembangkan oleh pihak BUMDes dan ada beberapa unit usaha yang menjadi Mitra BUMDes, sekalipun dalam hal ini BUMDes Torongrejo masih baru dalam proses perintisan dikarena BUMDes baru berdiri, sehingga memang terkait pendapatan yang didiapat oleh BUMDes masih sangat kecil, keuntungan juga tidak selalu meningkat tetapi BUMDes berusaha agar usaha yang sudah ada dapat berkembang dan tidak berhenti ,maka ada beberapa unit usaha di BUMDes Berkah Torongrejo, yaitu :

1. Unit perdagangan yang mempunyai ruang lingkup usaha yang barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, tetapi dalam hal ini mitra mengajukan ke pihak bumdes atas barang-barang tersebut dan pihak bumdes yang akan membantu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh mitra dan perkembangan dari unit usaha perdagangan bumdes sudah menjadi supplier 12 mitra warung kelontong yang tersebar di seluruh Desa Torongrejo dan sebagian lagi menjadi supplier kebutuhan pemerintah Desa Torongrejo dan juga kebutuhan diluar Desa Torongrejo pada acara tertentu.
2. Unit Saung Tani
Unit usaha yang ada dengan lingkungan pertanian yang bisa menjadi kawasan wisata desa, seperti wisata kuliner, edukasi pertanian, tempat meeting point group wisata, tempat pertunjukan seni budaya, tempat acara, display produk dari masyarakat lokal, informasi paket wisata potensi alam ataupun produk-produk lainnya.
3. Unit transaksi online
Berkerjasama dengan BNI 46 sebagai agen yang bisa mmebantu melayani kebutuhan konsumen yaitu dalam pembayaran tagihan listrik, telkom dan yang terbaru bisa pembayaran pajak bumi dan bangunan serta transaksi yang lainnya.
4. Unit produksi
Unit usahanya dengan membuat produk pangan maupun produk non pangan yang dibutuhkan konsumen, yaitu produk pangan membuat kue dan jajanan tradisional dan produk non pangan seperti souvenir, kaos, banner, brosur dan lainnya.
5. Unit event organizer
Usaha dengan menyediakan jasa untuk bisa membantu dan mengatur acara seperti wisata, acara instansi & perusahaan, pernikahan, dan lain sebagainya, tetapi masih sebatas tim dokumentasi

yang tersedia di unit event organizer, belum ada tim yang lain sehingga masih dibutuhkan sumber daya manusia yang lain lagi.

6. Unit pembiayaan

Usahanya denag mensupport usaha yang ada dilingkup masyarakat yang telah berjalan dengan baik yaitu denagan percetakan Arief dengan menyediakan mesin fotokopi yang kemudian dengan metode bagi hasil, ada juga untuk mesin scanner atau leasing dengan metode bagi hasil juga hasil yang didapatkan.

Unit usaha yang lebih dapat memberi dampak pada masyarakat secara langsung yaitu adanya unit produksi yang dimana pihak BUMDes memberikan kemudahan bagi produk masyarakat untuk dijual atau dipromosi dari pihak BUMDes kepada masyarakat luas melalui media sosial. Tetapi unit usaha yang lain juga adanya kerjasama BNI 46 yang sangat membantu kemudahan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan, dan tagihan lainnya karena BUMDes memberikan rasa kemudahan bagi masyarakat dan lebih menghemat biaya perjalanan masyarakat tanpa harus ke Bank Jatim yang memakan waktu dan biaya yang cukup besar juga bagi masyarakat.

Masyarakat tidak lagi kesulitan dalam memasarkan produk masyarakat, dan yang paling dibantu oleh BUMDes juga terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan masyarakat merasa terbantu sekali dengan adanya BUMDes membayar pajak tidak lagi jauh dan lebih menghemat biaya perjalanan. Terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan memang BUMDes memberikan kemudahan bagi masyarakat dan ini menjadi salah satu unit usaha yang memang terkait dalam bisnis sosial karena memang tidak mengambil keuntungan, tetapi lebih memberikan rasa kemudahan dan membantu masyarakat dalam membayar pajak, tidak ada keuntungan yang memang didapatkan langsung oleh BUMDes tetapi BUMDes sudah berusaha memberikan alternatif kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan ini juga kerjasama dengan pihak yang sudah membantu pihak BUMDes dapat dirasakan juga manfaat adanya BUMDes di Desa Torongrejo bagi masyarakat sekitar.

Disposisi

Sikap dari pemerintah Desa Torongrejo dan BUMDes di sini dapat dilihat dari tindakan melakukan kerjasama antar mitra. Pengelolaan BUMDes memang harus adanya bentuk kerjasama dan keterlibatan aktif baik dari pihak BUMDes maupun kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Torongrejo karena dengan demikian bisa tercapai kesejahteraan dimasyarakat. Kerjasama juga menghasilkan dua unsur yaitu adanya penambahan pendapatan dan juga peluang kerja yang bisa menjadikan masyarakat sejahtera dengan menambahnya pendapatan dan adanya peluang kerja dari kerjasama yang ada.

Pihak BUMDes yang datang ke toko-toko atau warung untuk bisa merangkul masyarakat untuk bisa bergabung dengan pihak BUMDes, keterlibatan masyarakat terutama pemilik toko ini menjadikan BUMDes bisa menjalin kerjasama dengan para pemilik toko sehingga bisa menjadi mitra dari pihak BUMDes. Pihak BUMDes membantu masyarakat yang mempunyai keterampilan dalam mengolah makanan atau jenis produk lainnya untuk dapat di promosikan dan masih sedikit, dan pihak dari BUMDes juga lebih banyak membantu terkait mitra BUMDes dalam hal kerjasama



Gambar 4. Disposisi Pemerintah Desa Torongrejo dan BUMDes pada Masyarakat dan Mitra
Sumber : Data Sekunder, 2021

Struktur Birokrasi

Badan Usaha Milik Desa Berkah Torongrejo atau disingkat BUMDes Bejo merupakan Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur Pada Tahun 2018. Dari pendirian BUMDes tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Desa Torongrejo (Pemerintah Desa, BPD, LPMD), Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pemerintah Kota Batu, Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Serta Dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi yang hal ini melalui pendamping Desa.

Tujuan dari adanya BUMDes di Desa Torongrejo sebagai salah satu organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting dalam rangka menguatkan ekonomi perdesaan, maka adanya upaya mendorong organisasi ini untuk mampu mengelola aset ekonomi strategis di Desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi untuk jadi daya saing ekonomi perdesaan, maka BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Desa.

Struktur birokrasi diperlukan sebagai sarana koordinasi dan proses (managemen) dari kelembagaan. Pada gambar 5 merupakan struktur dasar kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pada BUMDes Torongrejo secara observasi lapang sudah terdapat struktur yang menjalankan sesuai peraturan pemerintah ini. Hasil usaha dan manajemen yang ada sampai hari ini merupakan bentuk manajemen yang diterapkan berdasarkan struktur birokrasi ini.



Gambar 5. Struktur Organisasi Dasar BUMDes
Sumber : <https://www.aneiqbal.com>, 2021

KESIMPULAN

Implementasi pengelolaan pada BUMDes Torongrejo ditentukan pada aspek penting dari teori Edward III yaitu adanya komunikasi dalam bentuk rapat internal (karena bersifat pengelolaan, bukan pembentukan), adanya sumber daya sarana/prasarana yang memadai berupa unit-unit usaha, sikap saling bermitra, dan struktur yang mengelola. BUMDes ini perlu perhatian lebih bukan hanya dari pemerintah desa namun juga masyarakat untuk pengembangan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2021. *Struktur BUMDes, Tugas-Tugas, Contoh Bagan, dan Gajinya*. <https://www.aneiqbal.com/info/desa/struktur-bumdes/>, diakses tanggal 25 November 2021.
- Djam'an Satori . 2014. *Metodologi Penleitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Kabul Ali dan Indra S. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori Dan Aplikasi*. Kencana: Depok.
- Mardikanto, T dan Soebianto, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Peridabi Dkk. 2019. *Konstruksi Perencanaan Participatory Berbasis Budaya Kalosara*. Deepublish: Sleman Yogyakarta.
- Ridwan dan Nasar Baso. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Alfabeta: Bandung.
- Siagian P. Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. PT.Bumi Aksara: Jakarta.
- Soetomo . 2012. *Keswadayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiiitatif, dan R&D*. Alfabeta:Bandung.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.